

KAJIAN ARSITEKTUR RUANG PESISIR NEGARA KEPULAUAN: POTENSI DAN DAYA DUKUNG ILMU ARSITEKTUR DALAM KAJIAN PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA

Nur Endah Nuffida¹, Andy Mappa Jaya²

¹ Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia

² Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia
nuffida@arch.is.ac.id, mappajaya@arch.its.ac.id

ABSTRAK

Kecenderungan peningkatan populasi penduduk dunia yang bermukim di pusat-pusat perkotaan, dicatat oleh PBB pada tahun 2014, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari sumber yang sama diperkirakan, mayoritas 7,2 miliar penduduk dunia tinggal di kota-kota besar dan kecil, lebih banyak daripada di pedesaan. Daya tarik kawasan perkotaan disebutkan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yaitu harapan pekerjaan, pendidikan dan stabilitas. Jumlah penduduk kota di dunia meningkat pesat hingga dua kali lipat sejak tahun 1950, berdasarkan olahan sumber yang sama, terutama di kota-kota pesisir. Kepadatan penduduk di wilayah pesisir Indonesia membawa dampak berupa penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan penduduk kota akan sanitasi, air bersih dan lain-lain infrastruktur kota. Oleh karena itu, daya dukung ekosistem wilayah pesisir Indonesia dengan potensi spasial tanah, air dan udara membutuhkan perencanaan ruang berwawasan lingkungan untuk mencapai tujuan perencanaan dalam pembangunan, yaitu mengupayakan kerangka spasial dalam upaya berkehidupan penduduk. Tulisan ini merupakan upaya untuk memahami bagaimana penelusuran dan pengidentifikasian arsitektur ruang kota-kota pesisir di Indonesia diduga dapat memberikan dasar bagi pemikiran dan perencanaan pembangunan, khususnya bagi daerah yang secara spesifik memiliki potensi daya dukung lingkungan alami berbasis kepulauan. Pola penyebaran ruang hunian di beberapa kota besar di pesisir pulau Jawa diharapkan dapat memberikan dasar pembentukan paradigma teritorialitas dalam konteks budaya bermukim. Hasil yang didapatkan akan ditelaah melalui analisa dan sintesa untuk mendapatkan identifikasi awal tipe ruang (*spatial archetype*) yang sesuai berdasarkan konteks kekinian untuk telaah strategi pertahanan keamanan Indonesia. Penelitian ini pada akhirnya ditujukan untuk mendapatkan metode verifikasi yang sah melalui kerangka berpikir ilmiah dalam kajian ruang arsitektur. Metode tersebut diharapkan dapat menguak potensi dan daya dukung Ilmu Arsitektur dalam Kajian Pertahanan Keamanan Indonesia, dengan wawasan Negara Kepulauan.

Kata Kunci: kota pesisir; identifikasi tipe ruang; budaya bermukim dan teritorialitas; kajian ilmu Arsitektur; wawasan Negara Kepulauan; kajian pertahanan keamanan

1. PENDAHULUAN

Kepadatan penduduk di wilayah pesisir Indonesia membawa dampak berupa penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan penduduk kota akan sanitasi, air bersih dan lain-lain infrastruktur kota. Kepadatan penduduk dan keseluruhan permasalahan yang ditimbulkannya, merupakan bagian dari permasalahan pembangunan di Indonesia, yang menitikberatkan pada pembangunan (fisik) kota. Selama ini, penataan dan perencanaan ruang kota seolah-olah meninggalkan pendekatan-pendekatan dari bidang ilmu lain, khususnya arsitektur, dalam kajian wilayah kerjanya. Hal ini terbukti dari perencanaan ruang kota yang selalu didasarkan atas pertimbangan demografis, ekonomi, dan geografis. Perencanaan yang demikian tidaklah keliru, namun apabila berkaitan dengan konteks ruang hidup manusia, maka diperlukan sudut pandang yang dapat memberikan pertimbangan humanis yang menitikberatkan pengalaman keruangan (*spatial experience*), yang merupakan inti dari metode pengajaran dalam (studio) merancang ilmu arsitektur. Pentingnya pemahaman akan pengalaman tersebut dalam merencanakan ruang-ruang kota yang dibentuk berdasarkan garis dan titik pada peta, adalah karena sesungguhnya manusia dan keseluruhan daya dukung lingkungan (ekosistem)nya tidaklah dapat dipandang sebagai titik-titik pada permukaan peta. Manusia dan daya dukung lingkungan pada dasarnya adalah volume-volume ruang yang selalu bergerak mengisi ruang-ruang hidup yang dibentuk

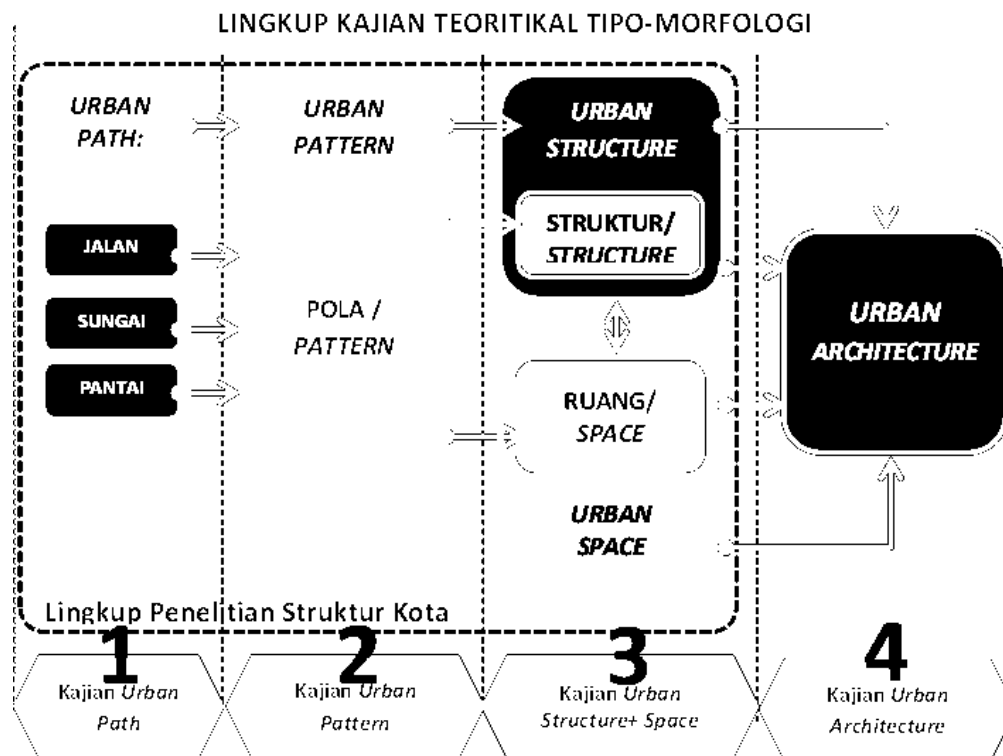
berdasarkan batas-batas bangunan, jalan, dan ruang-ruang terbuka kota. Arsitektur haruslah dipandang sebagai wilayah keilmuan yang tidak hanya berkait dengan perencanaan bangunan dan tampilannya namun pula memberikan daya dukung positif khususnya dalam perencanaan kota dan selanjutnya, pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas perencanaan kota, sangat penting untuk memahami akar dan kaitan perencanaan kota dari sudut pandang ilmu arsitektur, yang notabene adalah induk keilmuannya. Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan perencanaan dalam pembangunan, yaitu mengupayakan kerangka spasial dalam upaya berkehidupan penduduk dan daya dukung ekosistem wilayah pesisir Indonesia dengan potensi tanah, air dan udara maka dibutuhkan perencanaan ruang berwawasan kajian arsitektur di dalamnya. Kepadatan penduduk di wilayah pesisir Indonesia membawa dampak berupa penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan penduduk kota akan sanitasi, air bersih dan lain-lain infrastruktur kota. Oleh karena itu, daya dukung ekosistem wilayah pesisir Indonesia dengan potensi spasial tanah, air dan udara membutuhkan perencanaan ruang berwawasan lingkungan untuk mencapai tujuan perencanaan dalam pembangunan, yaitu mengupayakan kerangka spasial dalam upaya berkehidupan penduduk. Pengelolaan pesisir di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 2014. UU tersebut adalah perubahan dari UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan pesisir sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan amanat dari undang-undang yang perlu dijabarkan dan dipahami melalui metode pengidentifikasian potensi pesisir terutama dari aspek keruangannya. Setidaknya terdapat sepuluh sektor di wilayah pesisir yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran Indonesia, yaitu; (1) industri perikanan, (2) budidaya perikanan pantai dan budidaya laut, (3) industri pengolahan ikan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) energi dan pertambangan, (6) pariwisata pesisir dan laut, (7) transportasi laut dan pelabuhan, (8) industri maritim dan jasa, (9) sumber daya pulau kecil, dan (10) sumber daya non-konvensional (Dahuri, 2007). Pengembangan sepuluh sektor ini dapat membantu mengurangi pengangguran, menumbuhkan aktivitas ekonomi di daerah-daerah terpencil, meningkatkan reputasi Indonesia melalui estetika alamnya, mengembangkan teknologi yang dapat mendukung sektor industri lainnya.

2. METODE IDENTIFIKASI DAN ANALISA POTENSI

Tinjauan teoritis dilakukan untuk menjelaskan 3 (tiga) hal yaitu: 1) Pengertian-pengertian yang menyangkut bidang kajian penataan keruangan, 2) Variabel atau aspek-aspek, 3) Pendekatan teori dan metoda untuk menunjang pemahaman tentang penataan ruang yang diharapkan dalam penelitian-penelitian lanjutan akan dapat memberi dasar pengetahuan meliputi kajian tentang: 1) Elemen struktur kota /urban path, 2) Pola kota/urban pattern, 3) Struktur kota /urban structure dan 4). Ruang kota /urban spaces, serta berbagai wawasan tentang struktur kota dalam berbagai perspektif: *urban history*, *urban geography*, dan *urban architecture*. Kajian ini secara khusus dapat memberikan dasar terhadap lingkup kajian tipomorfologi dalam skala *urban-architecture*, seperti tergambar pada bagan 1.

Upaya untuk memahami bagaimana penelusuran dan pengidentifikasian arsitektur ruang kota-kota pesisir di Indonesia diduga dapat memberikan dasar bagi pemikiran dan perencanaan pembangunan, khususnya bagi daerah yang secara spesifik memiliki potensi daya dukung lingkungan alami berbasis kepulauan. Metode identifikasi dari sudut pandang ilmu arsitektur, memberikan peluang bagi arsitektur sebagai sebuah keilmuan, untuk memberikan dukungan secara ilmiah terhadap pembentukan paradigma berfikir dalam perencanaan dan pembangunan Indonesia, khususnya bagi daerah yang secara spesifik memiliki potensi daya dukung lingkungan alami berbasis kepulauan. Metode identifikasi dalam ilmu arsitektur Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis tata ruang berdasarkan perkembangan hunian di daerah pesisir secara deskriptif.

Bagan 1. Kajian Struktur Kota dengan pendekatan Tipo Morfologi
Sumber: Kusliansjah dan Ramadhan (2012)



Analisis ini dimaksudkan dengan mengidentifikasi struktur pemanfaatan ruang dalam interaksi antar wilayah kota, maka dapat diketahui pola teritorial yang terjadi. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam pengembangan pusat-pusat aktivitas di Surabaya, memberikan latar belakang bagi dasar pengembangan pusat-pusat aktivitas sebagai pusat pertumbuhan baik pada kawasan perkotaan maupun kawasan *hinterland*. Dalam analisis ini, tergambarkan pola permukiman, sistem jaringan prasarana perhubungan, serta wilayah-wilayah strategis secara geografis.

Dari gambaran tersebut, maka sebagai sebuah langkah awal, penelitian ini diarahkan untuk mencari dan mengidentifikasi keterkaitan antara ruang pesisir kepulauan dengan arsitektur pertahanan di Indonesia.

2.1. Potensi Arsitektur Ruang Kota Pesisir Berbasis Kepulauan

Beberapa kota besar di pesisir pulau Jawa, yaitu Surabaya, Jakarta dan Semarang diidentifikasi berdasarkan pola persebaran ruang hunian. Pola penyebaran ruang tersebut diharapkan dapat memberikan dasar pembentukan paradigma teritorialitas dalam konteks budaya bermukim Hasil yang didapatkan akan ditelaah melalui analisa dan sintesa berdasarkan identifikasi tipe ruang (*spatial archetype*). Penelitian ini pada akhirnya ditujukan untuk mendapatkan metode verifikasi yang sah melalui kerangka berpikir ilmiah dalam kajian ruang arsitektur. Metode tersebut diharapkan dapat menguak potensi dan daya dukung Ilmu Arsitektur dalam Kajian Pertahanan Keamanan Indonesia, dengan wawasan Negara Kepulauan.

2.2. Analisa dan Identifikasi Tipe Ruang Bermukim

a. Tipe Ruang Bermukim dalam Perjalanan Sejarah

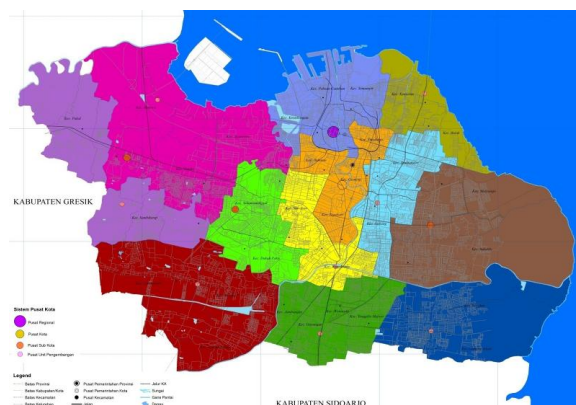
a.1. Pola Penyebaran Ruang Hunian

Nuffida (2010) mendeskripsikan bahwa epistemologi budaya perkotaan muncul sebagai akibat dari tradisi bermukim dengan segala aspek yang menjadi

sumber intepretasi sejarah sejak pertama kali istilah *polis* muncul di Yunani pada abad 5 M. Kota-kota di dunia berkembang dengan ciri khas yang sama yaitu kebutuhan hidup yang bersumber dari tradisi bermukim di wilayah tertentu. Kota-kota di Indonesia, khususnya Surabaya, dipengaruhi oleh periode-periode kekuasaan yang beralih dari kerajaan-kerajaan pra-VOC, kolonialisme Hindia Belanda dan Republik. Sebagai sebuah perbandingan, perkembangan kota di Eropa terjadi karena pengaruh –isme, ideologi, dan teknologi (Sunaryo, Soewarno, Ikaputra dan Setiawan, 2010). Analisis konfigurasi spasial dari pola pembentukan ruang untuk aktivitas dan kegiatan bersama di kota Surabaya dalam periode waktu yang berbeda-beda (1870-2010), menunjukkan fasilitas-fasilitas komunal seperti pasar, jalan, dan taman merupakan penanda sistem yang menggerakkan aktivitas-aktivitas bersama penduduk kota dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda di ruang kota. Fasilitas-fasilitas bersama tersebut merupakan poros penggerak kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, perdagangan dan pemerintahan (Nuffida, 2012).

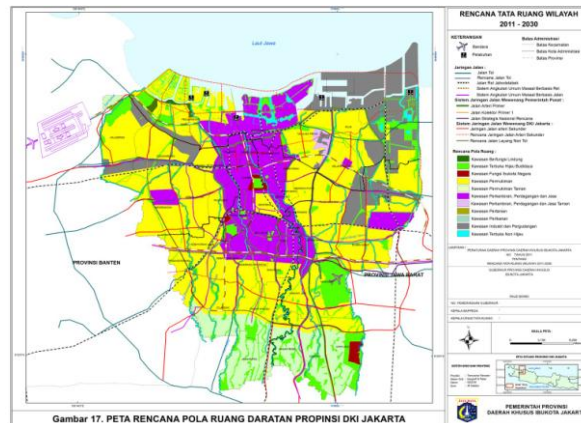
a.2. Paradigma Teritorialitas dalam Budaya Bermukim

Pada konteks kota-kota di Pulau Jawa, terdapat definisi konsepsi urban khas kota Indonesia. Misalnya, Santoso (2008) menyebutkan bahwa konsepsi ruang publik kota tidak dikenal dalam kota-kota Jawa, lebih dikarenakan faktor budaya dan sejarah bermukim kita yang berangkat dari tipologi kampung, bukan dari tipologi kota sebagaimana dipahami dunia barat. Deskripsi tersebut menjadi lebih jelas melalui pendapat Wiryomartono (1995) yaitu konsep kota di Jawa dipahami sebagai konsep kuta-negara, yang merupakan sekumpulan teritori kampung yang otonom dengan penguasa kampung. Dalam lingkup kampung-kampung ini, warga secara otonom mengorganisasi relasi sosial, ekonomi, budaya dan bahkan politiknya, yang kesemuanya termanifestasikan dalam tatanan spasial dan hirarki ruang mulai dari ruang privat, semi privat, semi publik, sampai kepada ruang publik. Konsepsi ini terpelihara sejak awal terbentuknya kota pra-VOC, kolonial Hindia Belanda, hingga periode Republik. Pentingnya pemahaman akan preseden tersebut, pada hakikatnya didasarkan secara spesifik pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara berbasis kepulauan, dengan sumber daya perairan dan maritim yang mencakup lebih dari 70% dari keseluruhan wilayah dan teritorial antar pulau dan antar wilayah negara yang dibatasi perairan laut. Sejumlah 50 persen atau 47 kota dari jumlah total kota di Indonesia merupakan kota pesisir, dengan rincian 5 kota metropolitan, 5 kota besar, 32 kota sedang, dan 5 kota kecil.



Gambar 1. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Surabaya

(Sumber: RTRW Kota Surabaya 2009-2029) <http://smart.surabaya.go.id/15072014/13.10> am



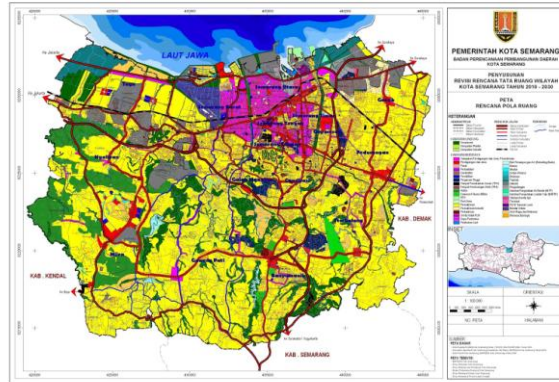
Gambar 2. Peta Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

(Sumber : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2013)

<http://nurwantoblogs.blogspot.com/2011/11/dinas-tata-ruang-dki-jakarta-sedang.html/15072014/13.10.am>.

Persoalan kemacetan lalu lintas di kota Jakarta tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta kota ini. Transportasi dan tata ruang merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain, karena transportasi dalam hal ini lalu lintas atau traffic merupakan fungsi dari tata guna lahan. Inventarisasi dan harmonisasi muatan materi kebijakan/peraturan terkait aspek transportasi dan tata ruang. Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan inventarisasi materi kebijakan atau peraturan perundang-undangan dari kedua aspek tersebut yang saling terkait. Perlu didiskusikan tentang arah untuk mengidentifikasi materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030 sebagai revisi Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta. Sehingga untuk kebutuhan tersebut, sebelumnya juga perlu mengidentifikasi materi muatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW DKI Jakarta 2030. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa UU No. 22 Tahun 2009 mengamanatkan perlu ada keterpaduan antara rencana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap rencana tata ruang wilayah. Walaupun tidak secara eksplisit menyatakan tentang keterpaduan antara kedua aspek tersebut, namun UU No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan muatan rencana tata ruang memuat rencana jaringan sistem prasarana termasuk sistem jaringan transportasi. Raperda RTRW 2030 memuat tentang sistem dan jaringan transportasi pada Pasal 17 hingga Pasal 37. Muatan materi yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalah sistem pusat kegiatan yang direncanakan pada Pasal 16. Perlu dipertimbangkan oleh pemrakarsa Raperda (Bappeda Provinsi DKI Jakarta): apakah sistem dan jaringan transportasi yang diuraikan pada Pasal 17 mampu mewadahi kebutuhan mobilitas akibat pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Pasal 16. Di mana arahan pengembangan sistem dan jaringan transportasi dimaksud raperda tersebut secara garis besar telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau. Kondisi empiris menunjukkan bahwa bangkitan lalu lintas akibat perkembangan tata guna lahan (Tata Ruang DKI Jakarta dipayungi Perda No. 9 Tahun 1999) tidak mampu diwadahi/dilayani oleh pertumbuhan jaringan transportasi (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DKI Jakarta dipayungi Perda No. 12 Tahun 2003). Komisi Hukum dan Humas menyarankan agar materi muatan Raperda RTRW 2030 perlu ditinjau kembali terutama konsekuensi rencana sistem pusat kegiatan terhadap rencana

sistem dan jaringan transportasi. Atau masalah bangkitan lalu lintas terhadap daya dukung sarana dan prasarana transportasi kota.

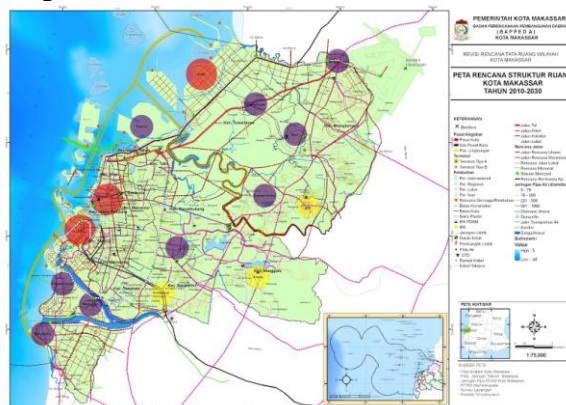


Gambar 3. Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang 2011-2030

(Sumber : Pemerintah Kota Semarang, 2013)

<http://pamboedifiles.blogspot.com/2013/06/peta-rencana-pola-ruang-kota-semarang.html>

Upaya pengkonseptualisasikan struktur kota lama dan pengembangan struktur baru pesisir kota Semarang. Rencana Tata Ruang Kota Semarang diarahkan untuk mengkaji struktur kota(jalan,sungai,kanal,pantai) sebagai bagian morfologi pembentuk kota Semarang dan menstrukturisasikan pola pengembangan kawasan pesisir kota ini sebagai *waterfront city*. Hal ini juga tampak pada rencana tata ruang kota Makassar, dalam gambar di bawah ini :



Gambar 4. Peta Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2011-2030

(Sumber : Pemerintah Kota Makassar, 2013)

<http://www.darimakassar.com/2013/02/09/rtrw-kota-makassar-2010-2030-2/>

Hasil pertemuan 43 wali kota sedunia dalam World Cities Summit di Singapura pada (2010) ,memberikan dasar untuk perencana kota Makassar untuk merevitalisasi perencanaan pembangunannya. Makassar dan Jakarta menjadi wakil Indonesia dalam pertemuan tersebut.Revitalisasi tersebut harus memperhatikan empat indikator penting, yakni arus manusia, bagaimana fungsi kota bekerja, geliat bisnis, serta organisasi yang terakomodasi dalam kehidupan perkotaan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan lingkungan serta keharmonisan warga.Makassar mengadopsi banyak hal dari beberapa kota besar yang dinilai maju dalam menerapkan kota berwawasan lingkungan. Hasil ini kemudian akan dikomunikasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah.Pantai Losari dinilai sangat berpeluang besar menjadi ikon kota pantai dunia. Untuk itu, Makassar merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar sebagai upaya untuk mengantisipasi dinamika masyarakat.

2.4. Ruang Bermukim dalam Konteks Kekinian serta Keterkaitannya dengan Teritorialitas

Indonesia adalah negeri kepulauan dengan karakteristik wilayah pesisir di Indonesia. Namun pemahaman mengenai pembangunan kota pesisir telah lama ditinggalkan seiring dengan melemahnya wawasan terhadap negeri kepulauan yang beralih ke konsep kota daratan. Seiring dengan hal tersebut terjadi pergeseran paradigma dalam pemaknaan keamanan nasional, seiring dengan perkembangan wilayah bebas dalam perekonomian dan perdagangan dalam satu wilayah regional sebagaimana yang dicontohkan dalam AFTA/NAFTA dan yang menyusul dalam waktu dekat yaitu AEC pada tahun 2015 yang akan datang.

Kota pesisir tumbuh secara signifikan dalam kurun satu abad terakhir, yang berakar dari faktor geografis dan sejarah. Perkembangan kota pesisir di Tanah Air selalu berawal dari pelabuhan dan kawasan pesisir yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan kota. Kota pesisir telah menjadi bagian dari rute dan pintu gerbang perdagangan internasional, pertukaran budaya bangsa, dan lambang kemakmuran bangsa serta kesejahteraan rakyat, sehingga memainkan peran ekonomi dan sosio-budaya yang penting dalam perkembangan budaya Nusantara. Dalam konteks kekinian, kawasan pesisir tidak lagi menjadi beranda dari kegiatan masyarakat di Indonesia yang umumnya menjadi pusat aglomerasi ekonomi kawasan sekitar dalam bentuk pelabuhan sebagai pasar atau lokasi transaksi ekonomi. Oleh karena itu menyadari akan konfigurasi negara kita NKRI, maka *geographical awareness* termasuk di dalamnya perlindungan terhadap upaya penataan ruang adalah kunci utama dalam pengambilan keputusan terkait dengan strategi pertahanan keamanan nasional. Tujuan utama dari perlindungan terhadap upaya penataan ruang adalah mendukung terciptanya ruang wilayah bagi kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif

3. KESIMPULAN

Dari paparan di atas, hal yang terpenting adalah bagaimana strategi nasional yang tepat sasaran dapat dirumuskan, dengan menggunakan semua elemen kekuatan nasional untuk mencapai kepentingan nasional. Profil keamanan nasional Indonesia akan diwujudkan dari realita: (i) geografi yang memanfaatkan dua pertiga laut, dan keberadaan di posisi silang dunia, (ii) kekayaan alam yang sangat beragam, baik yang di darat maupun di laut, (iii) penduduk 251 juta plus bonus demografi. Keseluruhan potensi tersebut dapat dinyatakan melalui upaya penataan ruang bermukim sebagai bagian dari strategi teritorial dalam wilayah Indonesia. Profil keamanan nasional yang diamanahkan konsitusi nasional tersebut adalah mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, melalui kebijakan penataan ruang dan teritorial. Terkait dengan sistem pengambilan kebijakan, seyogyanya Indonesia dapat memberikan penghormatan terhadap sistem nilai yang terkait dengan penataan ruang bermukim di seluruh daerah Indonesia, utamanya di seluruh wilayah pesisir Indonesia. Kearifan rakyat dalam memimpin bangsa Indonesia tentunya berakar pada sistem nilai bangsa sendiri, yaitu kemandirian dalam menentukan nasib sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, yang tercermin dalam kedaulatan penataan ruang bermukim bagi penduduk Indonesia.

REFERENSI

- Dahuri, Rohimin, 2001. *Mentransformasi Potensi Raksasa Ekonomi Kelautan Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa*, <http://dahuri.wordpress.com/2010/08/25/>
- Kusliansjah, Karyadi dan Ramadhan, Adam, 2012. *Struktur Pesisir (Waterfront) Kota Cirebon-Jawa Barat. Studi Kasus : Telaah Morfologi Kawasan Pesisir Kelurahan Panjunan Lemahwungkuk, Kasepuhan, Kasunean, Kota Cirebon*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Mangindaan, Robert, 2014, *Profil Keamanan Nasional NKRI 2014 – 2019 (Suatu Harapan kepada Pemerintah Baru)*. <http://www.fkpmaritim.org/2014/05/30>



- Nuffida, Nur Endah, 2012, *Tipogenesis Struktur Ruang Kota Nusantara: Kajian dan Definisi dengan Referensi Studi Kota Surabaya 1870-2010 berdasarkan Pergerakan Aktivitas Sosial-Ekonomi Warga Kota*. Proseding Seminar Nasional Semesta Arsitektur Nusantara-2. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang.
- _____, 2010. *City Life and Dynamic Process at Surabaya : Kampung Community, Social Space, and The Neighborhood*. 2010. Paper on International Conference of Kampung : A Target of Policy or An Abandoned Zones, Surabaya ,8 – 10th January 2010. Department of History, University of Airlangga, Surabaya.
- Makassar Menuju Kota Dunia*. www.tempointeraktif.com/17112010/15.15 am.
- Peta Rencana Pola Ruang Daratan Provinsi DKI Jakarta 2030*. <http://nurwantoblogs.blogspot.com/2011/11/dinas-tata-ruang-dki-jakarta-sedang.html/>
- Peta Rencana Struktur Ruang Kota Surabaya*. <http://smart.surabaya.go.id/15072014/> 13.10 am/
- Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang 2011-2030*. <http://pamboedifiles.blogspot.com/2013/06/peta-rencana-pola-ruang-kota-semarang.html/>
- Peta Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2011-2030*. <http://www.darimakassar.com/2013/02/09/rtrw-kota-makassar-2010-2030-2/>